

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kajian kritis terhadap transformasi kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia melalui lensa pendidikan pembebasan Paulo Freire mengungkapkan sebuah kebenaran fundamental, yakni persoalan kurikulum jauh melampaui domain teknis-administratif semata. Kurikulum sejatinya merupakan medan pertarungan ideologis yang sarat dengan relasi kuasa, kepentingan tersembunyi, serta tegangan antara berbagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh sebab itu, membaca perubahan kurikulum secara jernih meniscayakan pendekatan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis, reflektif, dan emansipatoris.

Pertama, gagasan pendidikan pembebasan yang dirintis Paulo Freire menawarkan paradigma alternatif yang melampaui konvensi pendidikan konvensional. Freire menolak keras paradigma *banking education*, yakni model yang mereduksi peserta didik menjadi wadah kosong yang menunggu untuk diisi dan guru sebagai satu-satunya pemegang otoritas kebenaran. Model semacam ini tidak hanya membelenggu kapasitas intelektual peserta didik, tetapi juga turut melanggengkan struktur penindasan di tengah masyarakat secara sistemik.

Sebagai antitesisnya, pendidikan hadap-masalah hadir sebagai antitesis atas pendidikan gaya bank. Orientasi utamanya pada pembebasan manusia. Berbeda dengan model konvensional yang bersifat satu arah, pendidikan hadap-masalah menempatkan dialog sebagai inti dari proses belajar-mengajar. Jika pendidikan gaya bank cenderung membatasi kreativitas dan mempertahankan kesadaran yang pasif, pendidikan hadap-masalah justru berupaya membangkitkan kesadaran kritis dengan menghadapkan peserta didik pada persoalan-persoalan nyata yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan keberadaan mereka di dunia. Dengan demikian, pendidikan pada hakikatnya adalah proyek humanisasi, sebuah upaya memanusiakan manusia agar ia mampu tampil sebagai subjek yang otonom, kritis, dan bertanggung jawab dalam arena kehidupan sosialnya.

Kedua, evaluasi perubahan kurikulum di Indonesia memaparkan pola yang kompleks dan sarat problem. Sepanjang perjalanan sejarahnya, mulai dari era kemerdekaan hingga masa kontemporer, kurikulum nasional telah berulang kali mengalami reorientasi yang mencerminkan dinamika zaman. Namun ironisnya, setiap gelombang perubahan tersebut tidak selalu diiringi kesiapan sistem pendidikan yang memadai secara menyeluruh. Ketidaksiapan ini memanifestasikan diri dalam berbagai dimensi, yakni kompetensi pendidik, kelengkapan infrastruktur, hingga pemahaman filosofis terhadap arah dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Perubahan kurikulum yang berlangsung terlalu cepat dan tidak berkesinambungan justru melahirkan instabilitas dalam praktik pendidikan. Para guru sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan acap kali terperangkap dalam dilema struktural. Mereka dituntut beradaptasi dengan kebijakan baru tanpa diberi ruang dan waktu yang cukup untuk menghayati substansi perubahan tersebut secara mendalam. Akibatnya, implementasi kurikulum lebih bersifat formalistik dan birokratis daripada substantif dan transformatif. Dalam kondisi demikian, pendidikan kehilangan rohanya sebagai proses pembentukan manusia utuh, dan tereduksi menjadi sekadar mekanisme pemenuhan target-target administratif.

Ketiga, dalam perspektif pendidikan pembebasan Freire, kurikulum Indonesia masih menampilkan dominasi paradigma hierarkis dan otoriter. Relasi antara guru dan peserta didik masih kerap diwarnai oleh pola dominasi, di mana guru memposisikan diri sebagai subjek aktif sementara peserta didik ditempatkan sebagai objek pasif yang menerima. Pola relasi semacam ini merupakan manifestasi nyata dari *banking education* yang dikritik keras oleh Freire. Dalam bingkai ini, peserta didik tidak mendapatkan ruang yang memadai untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis, melainkan lebih banyak diarahkan untuk menghafal dan mereproduksi informasi secara mekanis.

Lebih jauh, kurikulum juga kerap berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan yang terselubung. Dalam berbagai penggal sejarah, revisi kurikulum sering digerakkan oleh kepentingan politik tertentu, sehingga orientasi pendidikan bergeser dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi wahana reproduksi ideologi dominan. Di sisi lain, penetrasi logika kapitalisme ke dalam dunia

pendidikan memperkuat kecenderungan ini, di mana pendidikan diperlakukan sebagai komoditas yang harus disesuaikan dengan tuntutan pasar. Konsekuensinya, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan pembentukan karakter terpinggirkan dari agenda utama pendidikan.

Keempat, rekonstruksi kurikulum menuju pendidikan pembebasan menuntut perubahan mendasar, baik secara konsep maupun praktik. Kurikulum tidak dapat lagi dipahami sebagai dokumen statis yang ditetapkan secara sepihak oleh otoritas tertentu, melainkan sebagai proses dinamis yang melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, terutama guru dan peserta didik itu sendiri. Dalam bingkai ini, kurikulum mesti dirancang secara kontekstual dengan benar-benar mempertimbangkan realitas sosial, kekayaan budaya, dan kebutuhan peserta didik.

Kelima, penulis berani beranggapan bahwa pemikiran pendidikan pembebasan Paulo Freire memiliki keterbatasan dalam praktiknya di lapangan (Indonesia). Alasannya, Freire mengandaikan adanya kondisi tertentu agar pendidikan pembebasan berjalan optimal, adanya kebebasan berpikir, ruang dialog terbuka, serta lingkungan belajar yang suportif. Namun, dalam realitas pendidikan Indonesia masih ada kesenjangan infrastruktur, disparitas kualitas antar daerah, serta keterbatasan akses teknologi dan sumber belajar.

Selain itu, pemikiran pendidikan pembebasan Freire lahir dari konteks perjuangan melawan penindasan struktural di Amerika Latin. Konsep pendidikan pembebasan dalam pemikirannya memiliki dimensi politis yang kuat. Namun, dalam sistem pendidikan yang masih sensitif terhadap isu ideologi, pendekatan Freire berpotensi ditolak atau bahkan dibatasi. Hal ini membuat implementasinya tidak selalu leluasa tersebar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kultur dan geografis Brasil dan Indonesia. Secara kultur, Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya yang beragam daripada Brasil. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki gugus-gugus pulau yang lebih banyak daripada Brasil yang hanya memiliki satu daratan. Dengan demikian, sulit sekali membangun kurikulum untuk kebutuhan kaum marginal dan masyarakat daerah-daerah terpencil. Sebab, produk kurikulum yang dihasilkan lembaga pendidikan

cenderung bersifat sentral “jawa-sentrik” dengan mengikuti standar sekolah-sekolah pusat dan mengabaikan kebutuhan daerah 3T.

Pada akhirnya, dapat ditegaskan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia merupakan fenomena yang niscaya kompleks. Ia adalah cermin dari dinamika sosial yang lebih luas, yang merangkum relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta perkembangan budaya dan teknologi yang terus bergulir. Oleh sebab itu, transformasi kurikulum tidak dapat dilakukan secara parsial atau insidental, melainkan menuntut pendekatan yang komprehensif, kritis, dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah pemikiran Paulo Freire menawarkan fondasi filosofis yang kokoh untuk membangun kurikulum yang humanis, demokratis, dan yang membangun kesadaran kritis.

5.2 Saran

Bertolak dari serangkaian analisis dan refleksi yang telah diuraikan, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran konstruktif bagi upaya pembenahan kurikulum dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Pertama, bagi pemerintah. Pemerintah selaku pemegang otoritas kebijakan pendidikan harus memiliki komitmen yang kokoh dan konsisten dalam perumusan serta pengimplementasian kurikulum. Perubahan kurikulum semestinya berakar pada kajian mendalam yang bervisi jangka panjang, bukan sekadar respons pragmatis terhadap tekanan politik yang bersifat temporer. Di samping itu, setiap kebijakan yang ditetapkan harus disertai dukungan sistem yang memadai, mencakup pelatihan pendidik yang berkelanjutan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan sistem evaluasi yang holistik dan berkeadilan.

Kedua, bagi para guru. Guru merupakan subjek utama dalam melaksanakan perencanaan, pembelajaran, penilaian, dan tugas tambahan lain. Guru adalah kurikulum berjalan, guru adalah kurikulum itu sendiri (*living curriculum*). Efektivitas dan fokus guru dalam menjalankan tugas pendidikannya selama ini mengalami distorsi akibat serangkaian tantangan struktural, meliputi instabilitas kurikulum, ketidakseimbangan beban mengajar yang berdampak pada pencairan tunjangan profesi, serta akumulasi beban administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru secara sistemik melalui jaminan

pengembangan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, perlindungan profesi, pemberian penghargaan, dan simplifikasi beban administratif.¹ Guru tidak dapat lagi sekadar dipandang sebagai pelaksana kurikulum yang bersifat teknis, tetapi harus menjelma menjadi subjek yang aktif, reflektif, dan inovatif dalam mengembangkan praktik pembelajaran.

Ketiga, bagi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus membangun budaya akademik yang menopang terciptanya lingkungan belajar yang humanis, demokratis, dan kondusif. Lembaga pendidikan bukan dijadikan sebagai pabrik industri yang memproduksi tenaga kerja demi kepentingan kapitalis melainkan sebagai ruang produksi pengetahuan yang melahirkan individu-individu yang mampu berpikir kritis dan mempertanyakan kekuasaan. Lembaga pendidikan bertransformasi menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya dialog terbuka, refleksi kritis, dan eksplorasi gagasan secara bebas namun tetap bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kurikulum tidak sekadar dipahami sebagai panduan formal yang kaku, melainkan sebagai kerangka kerja yang lentur dan adaptif terhadap dinamika kehidupan peserta didik yang terus berkembang.

Keempat, bagi para peneliti dan akademisi. Kajian mengenai pendidikan pembebasan Paulo Freire dan relevansinya dalam konteks Indonesia masih membuka horizon yang sangat luas untuk dijelajahi. Penelitian-penelitian empiris yang mengkaji praktik pembelajaran berbasis dialog kritis dan penumbuhan kesadaran perlu terus didorong dan dikembangkan, guna memperkaya khazanah keilmuan sekaligus memberikan kontribusi nyata dan terukur bagi pengembangan pendidikan Indonesia yang lebih bermartabat.

Kelima, bagi masyarakat secara luas. Perlunya kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan semata kepada negara atau institusi formal. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses pendidikan, baik melalui keterlibatan langsung maupun pengawasan kritis terhadap kebijakan pendidikan, menjadi faktor determinan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas.

¹Sumardiansyah Perdana Kusuma, Pemulihan Pendidikan Tanpa Mengubah Kurikulum. *Kompas*.https://www.kompas.id/artikel/pemulihan-pendidikan-tanpa-mengubah-kurikulum?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 26 Maret 2026.

Sebagai catatan penutup, perlu ditegaskan dengan penuh keyakinan bahwa pendidikan yang membebaskan bukanlah pendidikan yang semata-mata mencetak individu-individu yang terampil secara teknis dan kompeten dalam pasar kerja. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang sanggup melahirkan manusia berkesadaran kritis, peka terhadap realitas sosial, dan berani memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam era yang ditandai oleh perubahan yang akseleratif dan kompleksitas yang kian berlapis, pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan bukan sekadar kebutuhan, melainkan keniscayaan sejarah. Oleh karena itu, upaya merekonstruksi kurikulum dalam sistem pendidikan dasar dan menengah harus terus dilangsungkan secara konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen Pemerintah / Regulasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006*.

Kemendikbud RI. (2020). *Peta Pendidikan Daerah 3T*.

Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*.

Republik Indonesia. (1954) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

II. Buku

Apple, M. W. *Educating the "Right" Way: Markets, Standards, God, and Inequality*. New York: Routledge, 2006.

Azzet, A. M. *Pendidikan yang Membebaskan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Becker, Gary. *Human Capital*. Chicago: University of Chicago Press, 1993.

Collins, D. *Paulo Freire: Kehidupan, Karya dan Pemikirannya* (H. Heyneardhi & A. P., Trans.). Yogyakarta: Komunitas Apiru, 2011.

Darmaningtyas. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press, 2004.

Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3S, 1972.

-----, *Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan* (A. A. Nugroho, trans.). Jakarta: PT. Gramedia, 1984.

-----, *Pendidikan yang Membebaskan*. Jakarta: MELIBAS, 2001.

-----, *Education as the Practice of Freedom*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

-----, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Y. W. Pradana, trans.). Yogyakarta: Narasi, 2019.

Giroux, H. A. *Neoliberalism's War on Higher Education*. Chicago: Haymarket Books, 2014.

- Giroux, H. A. *Pedagogy and the Politics of Hope*. New York: Routledge, 2022.
- Gutiérrez, Gustavo. *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation*, penerj. Sister Caridad Inda dan John Eagleson. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988.
- Husserl, Edmund. *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy*, penerj. F. Kersten. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1983.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, penerj. James W. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1993.
- Kierkegaard, Søren. *Concluding Unscientific Postscript*, penerj. Howard V. Hong dan Edna H. Hong. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- Kurniawan, M. D. *Pembaruan Pemikiran Pendidikan Paulo Freire*. Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Maritain, Jacques. *The Person and the Common Good*, penerj. John J. Fitzgerald. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1966.
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy, Volume I*, penerj. Ben Fowkes. London: Penguin Books, 1976.
- Mayo, P. *Higher Education and Critical Pedagogy: International Perspectives*. London: Bloomsbury Academic, 2021.
- McLaren, P. *Critical Pedagogy: A look at the Major Concepts*. New York: Routledge, 2022..
- Mulyasa. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- , *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- , *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- , *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Null, J. W. *Curriculum: From Theory to Practice*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2011.

- Rifa'i, M. *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Sartre, Jean Paul. *Being and Nothingness*, penerj. Hazel E. Barnes. New York: Washington Square Press, 1992.
- Schubert, W. H. *Curriculum: Perspective, Paradigm, and Possibility*. New York: McMillan, 1986.
- Smith, W. A. *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire* (A. Prihantoro, trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sukmadinata, N. S. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Suyanto, & Jihad, A. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Suyanto, Bambang. *Pendidikan dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Syukurman. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesia Tera, 2003.
- , *Manifesto Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas, 2005.
- , *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- , *Kurikulum dan Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- , *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Triwiyanto, T. *Krisis Tata Kelola Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2021.
- Yunus, Hamza H. dan Alam, Hedy Vanni. *Perencanaan Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012.
- Zais, R. S. *Curriculum: Principles and Foundations*. New York: Harper & Row, 1976.
- III. Artikel Jurnal
- A'yun, D. Q., & Maisaroh, S. "Pendidikan Dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara: Antara Kebebasan, Kemandirian, Kebudayaan,". *Jurnal Media Akademik*, 2:12, 2024.

- Abdillah, Rijal. "Analisis Teori Dehumanisasi Pendidikan Paulo Freire", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 2:1, 2017.
- Alhamuddin. "Sejarah Kurikulum di Indonesia". *Jurnal Nur El-Islam*, 1:2, 2024.
- Assyaukanie, L. "Gerakan Humanisme dalam Islam". *Jurnal Peradaban*, 2:2, 2022.
- Assyaukanie, Luthfi. "Membaca Kembali Gerakan Humanisme dalam Islam", *Jurnal Peradaban*, 2:2, 2022.
- Astuti Letde, L. "Pemulihan Transformatif Trauma Sejarah". *Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, 7:2, 2024.
- Eliot, Thomas H. "Toward and Understanding of Public School Politics", *Jurnal American Political Science Review*, 53:4, 1959.
- Fadli, R. V. "Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi Pemikiran Paulo Freire Dalam Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9:2, 2020.
- Fitriani, N., & Afrilianti, D. "Analisis Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)/Kurikulum2004". *Indonesian Journal on Education*, 1:3, 2025.
- Haryani Putri, A., & Suhardi. "Political System and Curriculum Policy". *Al-Ishlah*, 15:4, 2023.
- Herniyastuti, et al. "Membangun Masa Depan: Peran Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Inovasi Kurikulum Era Digital", *Jurnal PGSD Universitas Lamappapoleonro*, 3:2, 2025.
- Hidayat. "Kapitalisme Pendidikan dan Tantangan Kurikulum di Era Global. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15:1, 2023.
- Hidayat, Rudi. "Implementasi Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11:2, 2022.
- Husni, Muhammad. "Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire "Pendidikan Kaum Tertindas" Kebebasan Dalam Berpikir", *Jurnal Al-Ibrah*, 5:2, 2020.
- Imron, M. "Pengembangan Kurikulum 1994". *Jurnal Hasil Penelitian*, 2:1, 2018.
- Mere, Klemens. "Dampak Perubahan Kurikulum yang tak Menentu terhadap Kinerja Guru dan Kualitas Pembelajaran", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7:4, 2024.

- Mutiara, Ananda, et al. "Sejarah Perkembangan Kurikulum Sebagai Peran Penting Dalam Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya*, 3:1, 2024.
- Nadzifahah'isyah Fauzi, et al. "Kritik dan Implementasi Kapitalisme dalam Pendidikan Kontemporer: Kajian terhadap Komersialisasi Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia", *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 3:1, 2026.
- Prasetyo, Zainal K. dan Sutopo, Hadi "Evaluasi Kebijakan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 12:1, 2021.
- Putri, Agustina Haryani dan Suhardi. "The Influence of the Political System on Education Curriculum Policy in Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 15:4, 2023.
- Rahman, "Dinamika Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9:1, 2024.
- Rahmawati, D., & Suyanto. "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Guru". *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7:1, 2023.
- Ramadhani, Khumaira Zulvi, et al. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia; Perbandingan KTSP 2006 Dan Kurikulum 2013", *QOUBA: Jurnal Pendidikan*, 1:2, 2025.
- Rohinah. "Re-Konsientisasi Dalam Dunia Pendidikan (Membangun Kesadaran Kritis Melalui Pemikiran Paulo Freire)", *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8:1, 2019.
- Safei, Hunaidah. "Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)", *Jurnal Humanitas* 7:1, 2020.
- Sari, Mita dan Nugroho, Andi. "Resistensi Guru terhadap Perubahan Kurikulum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28:3, 2022.
- Setiawan dan Lestari, "Peran Guru Dalam Pembelajaran kritis di Era Kurikulum Merdeka", *Jurnal Pendidikan Modern*, 8:2, 2023.
- Shyafitri, Mey Sherly, et al. "Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, *Jurnal Pendidikan Indonesia(PJPI)*, 1:3, 2023.
- Syafitri, M. S., et al. "Kurikulum 2013 dan Merdeka". *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1:3, 2023.

- Syafrin, Dewi, et al. "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur", *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1:2. 2025.
- Syafrin, Dewi, et al. "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Indonesia: Kajian Literatur", *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1:2, 2025.
- Totoda, R. M., et al. "Analisis Kebijakan dan Peran Guru dalam Pergantian dan Pengembangan Kurikulum di Indonesia", *Jurnal Basicedu*, 7: 6, 2023.
- Widaningsih, W. "Humanisme Paulo Freire Paradigma Humanisme Paulo Freire Dalam Transformasi Manajemen Pendidikan Abad 21: Analisis Kritis Praktik Manajemen Pendidikan Saat Ini". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10:4, 2025.
- Widodo, & Nugroho. "Penguatan Karakter dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia". *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12:1, 2022.
- IV. Sumber Lain (Online/Media)
- Aranditio, S. (2024). "Catatan 2024: Kurikulum Pendidikan dan Pergantian Kekuasaan". *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/catatan-2024-kurikulum-pendidikan-dan-pergantian-kekuasaan>, diakses pada 26 April 2026.
- Hardiantoro, A., & Pratiwi, I. E. (2023). "Skor PISA Indonesia 2022 Turun tapi Peringkat Naik, ini Alasannya". *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/06/163000865/skor-pisa-indonesia-2022-turun-tapi-peringkat-naik-ini-alasannya>, diakses pada 11 November 2025.
- Kusuma, S. P. (2024). "Pemulihan Pendidikan Tanpa Mengubah Kurikulum". *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/pemulihan-pendidikan-tanpa-meng-ubah-kurikulum>, diakses pada 26 April 2026.